

Pohon Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah
Pemerintah Kota Blitar

LEVEL: STRATEGIS DAERAH

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	IK : Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektur Daerah	Pendampingan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, Monitoring desk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	BPKP Provinsi Jawa Timur, BPK Provinsi Jawa Timur, Seluruh OPD

LEVEL: URUSAN SUBURUSAN

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	IK : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti IK : Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Inspektur Daerah	Monitong Desk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Survey IPAK	(1) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti. (2) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Seluruh OPD, BPK Provinsi Jawa Timur

LEVEL: TAKTIKAL PROGRAM

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	IK : Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 IK : Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) IK : Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Inspektur Pembantu Wilayah	Monitoring Desk TLHP BPK, Penilaian Mandiri dan Penilaian Sejawat	(1) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1. (2) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (3) Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Seluruh OPD, BPK Provinsi Jawa Timur, BPKP Provinsi Jaim

LEVEL: TAKTIKAL KEGIATAN

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Meningkatnya penjaminan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	IK : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Monitoring Desk TLHP APIP	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Seluruh OPD
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	IK : Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Diskominfo
3	Meningkatnya peran APIP sebagai consulting partner	IK : Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK IK : Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Pendampingan OPD ZI	(1) Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK. (2) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	OPD terkait

LEVEL: OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Audit Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	OPD terkait
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Audit Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	OPD terkait
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	IK : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	OPD terkait
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	IK : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	OPD terkait
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	IK : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Penandatanganan MoU, Pendampingan Proyek Strategis, Pengawasan Perizinan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Aparat Penegak Hukum
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	IK : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Monitoring Desk TLHP BPK dan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Seluruh OPD
7	Terlaksananya penelaahan pengaduan masyarakat	IK : Jumlah dokumen hasil penelaahan pengaduan masyarakat	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Penelaahan Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penelaahan pengaduan masyarakat	OPD terkait

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
8	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	IK : Jumlah laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan OPD	Jumlah laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat	OPD terkait
9	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	IK : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Pendampingan dan Asistensi OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh OPD
10	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Urusan Pemerintah Daerah	IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Urusan Pemerintah Daerah	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Koordinasi, Monev, Audit, Reviu	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh OPD
11	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	IK : Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Monev, Audit, Reviu, Pendampingan, Sosialisasi	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Seluruh OPD
12	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Monev, Audit, Reviu, Pendampingan, Sosialisasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Seluruh OPD

No	Sasaran	Indikator	Dilakukan Oleh	Bentuk Kegiatan	Outcome	Crosscutting Dengan
13	Terlaksananya penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis terkait pengawasan	IK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang Disusun	Ketua Tim (Jabatan Fungsional Tertentu)	Penyusunan dan Reviu Kebijakan (Peraturan)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang Disusun	Bagian Hukum Sekretariat Daerah